



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raymond JH Takasenseran
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : M. Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

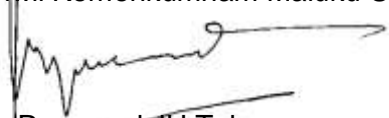
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Maluku Utara


M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi
Kanwil Kemenkumham Maluku Utara


Raymond JH Takasenseran
NIP. 19680116 199203 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM MALUKU UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1


Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 13,675,549,000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 13,675,549,000,-

Ternate, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Maluku Utara


M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi
Kanwil Kemenkumham Maluku Utara


Raymond JH Takasenseran
NIP. 19680116 199203 1 001



**DEKLARASI
JANJI KINERJA 2022**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raymond JH Takasenseran

Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 18 Januari 2022

Kepala Divisi Administrasi
Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

Raymond JH Takasenseran
NIP. 19680116 199203 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Filianto Akbar
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : M Adnan
Jabatan : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Maluku Utara

Filianto Akbar
NIP. 19650903 198503 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12



**DEKLARASI
JANJI KINERJA 2022**

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1,462,670,000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1,462,670,000,-

Ternate, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara



M Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Maluku Utara



Filianto Akbar
NIP. 19650903 198503 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Filianto Akbar
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 18 Januari 2022

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Maluku Utara

Filianto Akbar
NIP. 19650903 198503 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Teguh Wibowo
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : M. Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Maluku Utara


M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kanwil Kemenkumham Maluku Utara


Teguh Wibowo
NIP. 19650406 199001 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM MALUKU UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70%
		3. Persentase menurunnya residivis	1%
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	50
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	70



DEKLARASI
JANJI KINERJA 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan		
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	81%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang



DEKLARASI
TANPA KINERJA 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku	80%



DEKLARASI
JANJI KINERJA 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		gangguan kamtib	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1,027,254,000.-

Ternate, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Maluku Utara


M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasarakatan
Kanwil Kemenkumham Maluku Utara


Teguh Wibowo
NIP. 19650406 199001 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Teguh Wibowo

Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 18 Januari 2022

Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

Teguh Wibowo
NIP. 19650406 199001 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raymond JH Takasenseran
Jabatan : Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham
Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : M. Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Maluku Utara


M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kemenkumham Maluku Utara


Raymond JH Takasenseran
NIP. 19680116 199203 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2
2.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20 %
3.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
4.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81 %
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
5.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	70 %
		Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	40 %



DEKLARASI
JANJI KINERJA 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	86 %
2.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32
3.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
		Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	20 %
4.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%
5.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%
6.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61%
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61%



DEKLARASI
JANUARI KINERJA 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	20 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	5 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	4 Laporan
5.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan	12 Orang



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	peraturan perundang-undangan	perundang-undangan	
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	3 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi



Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3,856,317,000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp. 2,031,284,000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 913,609,000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 911,424,000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 379,254,000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 247,000,000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 132,254,000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 273,061,000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 273,061,000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 235,670,000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 235,670,000,-

Ternate, 18 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Maluku Utara



M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan
HAM
Kanwil Kemenkumham Maluku Utara



Raymond JH Takasenseran
NIP. 19680116 199203 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

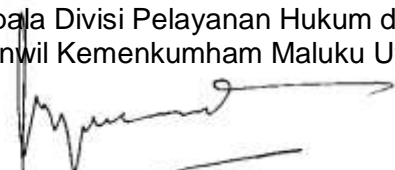
Nama : Raymond JH Takasenseran
Jabatan : Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham
Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 18 Januari 2022

Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kanwil Kemenkumham Maluku Utara


Raymond JH Takasenseran
NIP. 19680116 199203 1 001

